



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



**BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

i



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas selesainya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, Dokumen Perubahan Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun 2023, tujuan dan sasaran BPSDM tahun 2024, serta rencana kerja dan pendanaan BPSDM tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja BPSDM Tahun 2025 masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan sebagai pelaksanaan urusan Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, adanya rekomendasi yang konstruktif terhadap identifikasi permasalahan, arah kebijakan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasannya dengan sasaran dan prioritas nasional, serta identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan provinsi dan kota/kabupaten sangat diharapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Semoga rida Allah Swt. menyertai dalam pelaksanaan Dokumen Perubahan Renja BPSDM Tahun 2025.

Jakarta, 2025

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,





IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

ii



IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPSDM Tahun 2025 berisi evaluasi kinerja BPSDM Tahun 2023, Identifikasi Permasalahan BPSDM Tahun 2025, Sasaran Kerja Prioritas BPSDM Tahun 2025, serta Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Indikatif Kegiatan BPSDM Tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi kinerja BPSDM Tahun 2023 dan Isu-isu Strategis di dalam Renstra BPSDM Tahun 2023-2026, maka isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh BPSDM pada tahun 2024 antara lain :

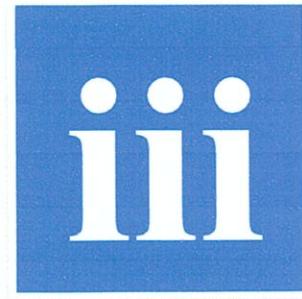
1. Meningkatkan kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur;
2. Mendorong kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT PPKKP - BLUD *Jakarta Public Policy Center* (JPPC).

Dalam menjawab isu-isu tersebut Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 fokus terhadap peningkatan kualitas Pengembangan Kompetensi SDM tersebut akan mendorong tercapainya indikator sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

Pada Renja 2024 BPSDM terdapat 3 Program, 23 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan, serta 44 Aktivitas sub kegiatan pada 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 2 UPT (UPT PUSDATIN termasuk UPT PPKKP yang berupa BLUD JPPC). Lebih lanjut Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPSDM Tahun 2025 dan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.



DAFTAR ISI





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSDUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPSDM TAHUN 2023	5
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPSDM TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA BPSDM SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPSDM	19
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPSDM.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPSDM TAHUN 2024	27
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	28
3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	28
3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	28
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPSDM.....	29
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDM.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPSDM TAHUN 2025	40
BAB V PENUTUP	43
A. LAMPIRAN REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPSDM 2023	A
B. LAMPIRAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD/UKPD BPSDM TAHUN 2025.....	B



DAFTAR GAMBAR

iv



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi BPSDM	22
Gambar 3.12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	28



DAFTAR TABEL

V



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024

 Program BPSDM 7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM s.d. Tahun 2023 20

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Tahun 2023-2026 30

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 32

Tabel 4.1 Rencana Kerja PD/UKPD BPSDM Tahun 2025 42



PENDAHULUAN

Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan

1



1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan dokumen Perubahan Renja BPSDM Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja RKPD Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja BPSDM Tahun 2023, Target Kinerja tahun 2025 dalam Renstra BPSDM Tahun 2023–2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik;
14. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026.

1.3 MAKSDU DAN TUJUAN

Perubahan Renja BPSDM Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke dalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025;



3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Perubahan Renja BPSDM tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Perubahan Renja BPSDM, keterkaitan antara Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM, serta proses penyusunan Renja.

BAB 2 : Hasil Evaluasi Renja BPSDM Tahun 2023

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2023 (n-2) dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan BPSDM. dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM.

BAB 3 : Tujuan dan Sasaran BPSDM Tahun 2024

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPSDM, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPSDM, Program dan Kegiatan BPSDM.

BAB 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BPSDM Tahun 2025

Bab ini memuat Rincian Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikatif BPSDM Tahun 2025.

BAB 5 : Penutup

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



HASIL EVALUASI RENJA BPSDM TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian
Renstra sampai dengan Tahun 2023, Analisis Kinerja
Pelayanan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2



2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPSDM TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA BPSDM SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2023 dan Capaian Renstra BPSDM pada Tahun 2023. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan, isu-isu strategis, program dan kegiatan Perubahan Renja BPSDM Tahun 2025.

Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan BPSDM Tahun 2023 serta realisasi target sasaran Renstra BPSDM pada Tahun 2023. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPSDM Tahun 2023 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Terdapat 3 (tiga) program utama pada 2 (dua) urusan yang diampu oleh BPSDM yaitu:

- a. Urusan Kepegawaian, digunakan bersama oleh BPSDM dan BKD
 - i. Program Kepegawaian Daerah
- b. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
 - i. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - ii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi capaian masing-masing program pada kedua urusan tersebut tersaji dalam tabel 2.1. berikut.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BPSDM dan Pencapaian Rencana Strategis BPSDM (sampai dengan Tahun 2024)

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan	
										Target Renstra Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)		
A	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
A	5	03				KEPEGAWAIAN											
A	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Percentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	Percentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	95 persentase	80%	100 %	100	80 persentase	80 persentase	100 %		
A	5	03	02	1	03	Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Kepuasan atas fasilitas pelaksanaan tugas belajar	4 Nilai				4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai		
A	5	03	02	1	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pengiriman tugas belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	110 Orang	95 Orang	108 Orang	114	110 Orang	110 Orang	110 Orang	
A	5	03	02	1	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah peserta Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	110 Orang	100 orang	100 orang	100	110 Orang	110 Orang	110 Orang	
A	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
A	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah Akreditasi Kediklatan yang tersedia	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	6 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Nilai	6 Nilai	6 Nilai		
A	5	04	02	1	01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Percentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade	85 Persen	60 persen	86.78 persen	144,633333	80 Persen	80 Persen	100		



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Grand Design Jakarta Corporate University	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokum en	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pengembangan e-learning	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	3 Modul e- Learning	3 Modul e- Learning	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah penyusunan kurikulum diklat	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	4 Jenis	4 Jenis	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan	
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)		
A	5	04	02	1	01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah penyusunan modul diklat	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	24 Modul	24 Modul	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100		
A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	85 Persen	48 persen	85.09 persen	177,270833 3	80 Persen	80 Persen	100		
A	5	04	02	1	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Analisa Kesenjangan Kompetensi yang tersusun sesuai ketentuan			1 Dokum en	1 Dokumen	100					



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	5	04	02	1	02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Standar Kompetensi Jabatan dalam rangka Sertifikasi Profesi yang tersusun sesuai ketentuan			4 Standar Kompetensi	4 Standar Kompetensi	150				
A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	6 Nilai	65%	85.09 %	130,907692 3	6 Nilai	6 Nilai	100	
A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	85 Persen	48 persen	85.09 persen	177,270833 3	80 Persen	80 Persen	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	30 orang	92 orang	102	1261 Orang	1261 Orang	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	30 orang	360 orang	1200	1261 Orang	1261 Orang	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	90 orang	300 orang	333,333333	1261 Orang	1261 Orang	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Kepala Sekolah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	60 orang	300 orang	500	1261 Orang	1261 Orang	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PKA)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	30 orang	60 orang	200	1261 Orang	1261 Orang	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PKP)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	30 orang	180 orang	600	1261 Orang	1261 Orang	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Pengawas Sekolah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	30 orang	60 orang	200	1261 Orang	1261 Orang	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	10 orang	35 orang	350	1261 Orang	1261 Orang	100	
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan I, II dan III	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1347 Orang	400 orang	3072 orang	768	1261 Orang	1261 Orang	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Renc na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	6 Nilai	57%	70.03 %	122,859649 1	6 Nilai	6 Nilai	100	
A	5	04	02	1	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade	85 Persen	60 persen	86.78 persen	144,633333 3	80 Persen	80 Persen	100	
A	5	04	02	1	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	550 Orang	1000 orang	1069 orang	106,9	550 Orang	550 Orang	100	
A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	6 Nilai	68%	80.24 %	118	6 Nilai	6 Nilai	100	
A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	85 Persen	48 persen	85.09 persen	177,270833 3	80 Persen	80 Persen	100	
A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah penjaminan mutu dan SMM ISO 9001:2015	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	1 smm & ISO	2 smm & ISO	200	1 Laporan	1 Laporan	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Rencana Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)	Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)		
A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Widya Iswara	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	10 Orang	35 Orang	350	1 Laporan	1 Laporan	100	
A	5	04	02	1	02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah program diklat yang terakreditasi / reakreditasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	2 Diklat	3 Diklat	150	1 Laporan	1 Laporan	100	
A	5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Percentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	6 Nilai	74%	111.75 %	151,0135135	6 Nilai	6 Nilai	100	
A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	85 Persen	48 persen	85.09 persen	177,2708333	80 Persen	80 Persen	100	
A	5	04	02	1	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	500 Orang	800 orang	827 orang	103,375	500 Orang	500 Orang	100	
A	X						X									100	
A	X	XX					XX									100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Rencana Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 indeks	4 indeks	100	4 Indeks	4 Indeks	100	
A	X	XX	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	4 nilai	4 nilai	100	4 Indeks	4 Indeks	100	
A	X	XX	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran Gaji atau Tunjangan ASN yang sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	100 persen	100 persen	100	100 Orang/Bulan	100 Orang/Bulan	100	
A	X	XX	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Indeks	4 nilai	4 nilai	100	4 Indeks	4 Indeks	100	
A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Paket	1 Paket	100	
A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Diklat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Paket	1 Paket	100	
A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Paket	1 Paket	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Keterangan	
											Target Rencana Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)				
A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan terhadap Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Paket	1 Paket	100	
A	X	XX	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Paket	1 Paket	100	
A	X	XX	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai kepuasan terhadap layanan fasilitasi BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Paket	1 Paket	100	
A	X	XX	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4 Nilai	4 Nilai	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4 Nilai	4 Nilai	100	12 Laporan	12 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 indeks	4 indeks	100	4 Indeks	4 Indeks	100	
A	X	XX	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Nilai	4 Nilai	100	12 Laporan	12 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Nilai	4 Nilai	100	12 Laporan	12 Laporan	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)	
A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas jasa bidang teknis dan penunjang tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan kinerja petugas keamanan kantor tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan terhadap penyediaan perlengkapan petugas jasa bidang teknis dan penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Nilai	4 Nilai	100	12 Laporan	12 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan terhadap penyediaan perlengkapan petugas keamanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Nilai	4 Nilai	100	12 Laporan	12 Laporan	100	
A	X	XX	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 nilai	4 nilai	100	4 Indeks	4 Indeks	100	
A	X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan terhadap layanan pemeliharaan KDO/KDO Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	4 Nilai	4 Nilai	100	10 Unit	10 Unit	100	
A	X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai kepuasan terhadap penyediaan jasa pajak dan perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	4 Nilai	4 Nilai	100	10 Unit	10 Unit	100	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja PD Tahun 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan	
											Target Renca na Kerja PD Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja PD Tahun 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Capaian Renstra (%)		
A	X	XX	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	4 Nilai	4 Nilai	100	30 Unit	30 Unit	100		
A	X	XX	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan kinerja petugas jasa kebersihan tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12 Laporan	12 Laporan	100	0 Unit				
A	X	XX	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Terhadap Penyediaan Perlengkapan Petugas Jasa Kebersihan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Nilai	4 Nilai	100	0 Unit				



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPSDM

Analisis capaian kinerja BPSDM dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM terdapat dalam Tabel 2.2. seperti pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimum/Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Rencana Strategis BPSDM						Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit dengan pembobotan sebagai berikut: 1) perencanaan kebutuhan 10%; 2) pengadaan 10%; 3) pengembangan karier 30%; 4) promosi dan mutasi 10%; 5) manajemen kinerja 20%; 6) penggajian, penghargaan dan disiplin 10%; 7) perlindungan dan pelayanan 4%; dan 8) sistem informasi 6%. Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit yaitu: Kategori IV nilai 325-400 (Sangat Baik), Kategori III nilai 250-324 (Baik), Kategori II nilai 175-249 (Kurang), dan Kategori I nilai 100-174 (Buruk).	Pengembangan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan Knowledge Management	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	Telah dilakukan perhitungan mandiri BPSDM dan BKD	
2	Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri. Sumber data : SIMPEG dan SAPK	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	36	38,7	38,8	38,9	39	N/A	38,7	36	38,7	39	Menunggu penilaian dari SAPK BKN	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

Isu Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 antara lain:



Dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan dengan standarisasi tinggi menjadi tuntutan masyarakat yang lebih luas. Dengan kedudukan yang demikian, DKI Jakarta menjadi barometer bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dalam mengelola birokrasi dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu, Isu Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu penopang utama berhasil tidaknya upaya memperbaiki layanan publik dalam kerangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan birokrasi yang lebih akuntabel. Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi DKI Jakarta selama ini yang harus terus diperbaiki guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi serta pemberian budaya kerja yang mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan ibukota bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan kompetensi aparatur oleh BPSDM menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menyejahterakan.

Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPSDM dan dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Strategi untuk mencapai tujuan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dihasilkan dari hasil analisis *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*) untuk memahami peta kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dan eksternal.

Strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi BPSDM

dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM Aparatur DKI Jakarta. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan integritas dan perbaikan layanan aparatur.

Dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, dirumuskan strategi Renstra BPSDM Tahun 2023-2026, yaitu

1. Peningkatan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur; dan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Kedua strategi tersebut merupakan representasi dari tugas dan fungsi BPSDM yang diselenggarakan oleh seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan BPSDM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran dengan Strategi BPSDM



1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

Guna mengantisipasi setiap tantangan dan tuntutan pelayanan publik aparatur DKI Jakarta maka peran pengembangan kompetensi menjadi sangat strategis, melalui berbagai jenis kediklatan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan sebagainya; termasuk sertifikasi profesi SDM. Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pengembangan kompetensi SDM Aparatur dimaksudkan agar penyelenggaraan, antara lain, diklat di lingkungan BPSDM semakin dapat memenuhi kebutuhan (pengembangan) kompetensi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam volume atau kapasitas layanan disertai peningkatan mutu yang semakin baik (*excellent*).

Hal paling mendesak dari perbaikan kinerja bidang pengembangan kompetensi adalah bagaimana meningkatkan kapasitas layanan berupa peningkatan peserta diklat di berbagai jenis diklat yang diselenggarakan maupun peningkatan jenis diklat itu

sendiri sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu, terdiri dari (yang sudah ada):

- a. Pengembangan Kompetensi Manajerial; meliputi: Pendidikan Kepemimpinan Administrator, Pendidikan Kepemimpinan Pengawas, Pendidikan Dasar dan Kader, serta Diklat Manajerial lainnya.
- b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional; meliputi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan beberapa penunjang urusan pemerintahan, Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dilaksanakan melalui Diklat Fungsional, yaitu diklat pembentukan jabatan fungsional dan diklat penjenjangan jabatan fungsional.
- c. Pengembangan Kompetensi Pemerintahan; yaitu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pegawai di setiap OPD. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.
- d. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural; adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaannya. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terpusat di BPSDM.

Untuk meningkatkan kompetensi dalam jabatan tersebut di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan, *Webinar*, *Podcast*, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran pegawai dengan swasta, bimbingan teknis, sosialisasi, tugas belajar, *workshop* dan *coaching* untuk setiap jajaran dalam struktur organisasi BPSDM. Pengembangan kompetensi ini dilakukan untuk menambah kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pegawai yang profesional sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing.

Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Proses pengembangan karier dalam suatu pendekatan formal yang diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan- peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemetaan kebutuhan diklat dan target rekrutmen peserta diklat;
- b. Peningkatan mutu penyelenggaraan pengembangan SDM;
- c. Adanya kerja sama pengembangan kompetensi SDM dengan Lembaga Dalam dan

- Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan dan Sektor Publik;
- d. Penetapan standar kompetensi pada seluruh jabatan (JFT dan non JFT);
 - e. Peningkatan kualitas uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

2. Optimalisasi Dukungan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kompetensi Berstandar Global

Agar pengembangan kompetensi menghasilkan SDM aparatur (alumni diklat) yang semakin profesional dalam mengemban tugas dan fungsi organisasi di masing-masing OPD maka bidang pengembangan kompetensi harus didukung dengan kapasitas kelembagaan yang berstandar tinggi, termasuk upaya-upaya penjaminan mutunya.

Strategi optimalisasi dukungan kelembagaan dan peningkatan mutu pengembangan kompetensi berstandar global pada dasarnya dimaksudkan untuk menghantarkan layanan BPSDM berkelas internasional sebagaimana apa yang dimaksud sebagai *government university*.

Manajemen SDM harus dilakukan secara profesional. BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai unit kerja yang bertugas melakukan peningkatan kompetensi pegawai, harus menyelenggarakan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memberikan motivasi, penyegaran dan pengembangan kompetensi dan kapasitas serta meningkatkan kualitas pelayanan sebagai abdi negara di lingkungan BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan standarisasi dan penjaminan mutu dimaksudkan untuk dapat mendukung layanan yang diselenggarakan oleh bidang pengembangan kompetensi melalui perbaikan prosedur perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang standarisasi penjaminan mutu agar peserta diklat dapat direkrut semakin banyak dengan penggerahan sumber daya organisasi yang semakin efisien. Upaya-upaya dimaksud juga termasuk memanfaatkan seoptimal mungkin kearifan teknologi informasi dalam seluruh tahapan pengelolaan diklat (termasuk pelaksanaan), mulai dari persiapan, pendaftaran hingga diklat berakhir.

Untuk terus mengenali berbagai area perbaikan atau peningkatan kualitas diklat, hal penting yang dilakukan adalah terus memperbaiki atau mengefektifkan monitoring dan evaluasi, tidak saja pada keseluruhan proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM melalui bidang-bidang pengembangan, tak kalah penting juga memantau dampak diklat terhadap kinerja dan perbaikan layanan pegawai DKI Jakarta.

Upaya atau dukungan lain yang tak kalah penting dalam pengembangan kapasitas lembaga yaitu rangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang

efektif, dan efisien; termasuk upaya-upaya berkelanjutan agar BPSDM menjadi institusi pengembang SDM berskala internasional. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang perumusan strategi dan program BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kapasitas kelembagaan dalam hal ini mencakup sumber daya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya.

Kapasitas Kelembagaan Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumber daya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga pengembangan SDM diharapkan kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan perangkat daerah serta pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu hal yang terpenting dalam pemberdayaan kapasitas kelembagaan adalah menyangkut aspek kepegawaian, di mana kondisi pembinaan pola karier aparatur saat ini tidak didasarkan pada standar kompetensi baik persyaratan umum, persyaratan manajerial, dan persyaratan teknis, sehingga berdampak kurang positif terhadap kinerja instansi serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Pembentukan kelembagaan perangkat daerah, dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, kebijakan yang diambil salah satunya adalah menjadikan UPT PPKKP menjadi BLUD JPPC. Dari segenap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan BPSDM, hal paling mendesak dan menjadi *urgent* adalah penyediaan gedung diklat terpadu yang hingga saat ini masih belum terwujud; yang antara lain adalah untuk meningkatkan tampungan peserta dalam bentuk penambahan kelas, asrama, dan lain-lain.

Penyediaan gedung terpadu dimaksud juga secara langsung menjadi pemicu kinerja widyaiswara agar dapat menjalankan tugas dan fungsi menjadi lebih baik karena antara lain perpindahan ruang mengajar dari satu acara kelas ke kelas berikutnya menjadi lebih efisien.

Melihat segala sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat dipastikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mewujudkan pusat pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional (*world class melalui government university*).

Pada gambar tersebut tampak pula bahwa kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus meningkat pesat, mulai dari diklat masa lalu yang sederhana kemudian dikembangkan sedemikian rupa dengan segala modal internal yang dimiliki (SDM:

Pengelola Diklat (+) WI; Sertifikasi WI, Asesor, dan Akreditasi; Sarpras: CAT, Asrama, Ruang Kelas, Ruang Inovasi; Program: prioritas SC dan CB; Kelembagaan: SOP/Standarisasi Struktur organisasi).

Menjadikan BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi *smart* diklat melalui berbagai pelaksanaan diklat berbasis IT (SIM Diklat: pendaftaran, *e-coaching*, *Cop*; *E-evaluasi*; Metode *IT based*; Diklat jarak jauh (*e-learning*).

Keberhasilan ini didukung pula dengan diperolehnya sertifikasi *centric* melalui pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan negeri (2016); LSP 1 (2017); usulan kebijakan karier pelaksana; (*SQ Award*) Sertifikasi Award sebagai acuan tingkat nasional serta pengembangan *knowledge management*.



TUJUAN DAN SASARAN BPSDM TAHUN 2024

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja BPSDM, Program dan Kegiatan

3

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema “Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Menuju Pemantapan Kota Global”.

Terdapat 6 (enam) arah kebijakan prioritas Pembangunan RKP 2024 antara lain yaitu:

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
2. Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
4. Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru
5. Revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi;
6. Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Merujuk kepada 6 (enam) arah kebijakan prioritas, terdapat hal yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta selaku pengembang urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu “Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan”.

3.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator.

Gambar 3.1.2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)





Dalam Gambar 3.1.2, terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. Tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 16: *Goals 16–Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh–mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPSDM

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 merujuk kepada Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026. Tujuannya adalah mendukung RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 yang Sasaran RPD-nya yaitu “Peningkatan Kompetensi ASN dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat”. Dengan demikian, tujuan dan sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Tahun 2023–2026 terlampir.



Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPSDM Tahun 2023–2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Pengembangan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan Knowledge Management	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Indeks sistem merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM	31	31	31	31
2.			Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi	38.7	38.8	38.9	39



Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tabel 3.2 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024, maka prioritas kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2024 antara lain:

1. Program pengembangan kompetensi SDM;
2. Revitalisasi pengembangan sumber daya aparatur;
3. Penguatan UPT PPKKP – BLUD JPPC.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDM

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat beberapa penyesuaian baik pada nomenklatur kegiatan, penambahan struktur Sub-Kegiatan, penggunaan kode rekening beserta kodefikasinya.

Seiring dengan adanya Peraturan tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sehingga dapat mengadaptasi struktur program dan kegiatan serta mengubah cascading kinerja yang berimplikasi pada penilaian AKIP Provinsi DKI Jakarta ke depannya. Implikasi dari perubahan RPJMD tersebut juga mengharuskan masing-masing Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk sisa masa Periode 2022-2026. Program pada Renja 2023 menggunakan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019.

Program tersebut antara lain:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Program Kepegawaian Daerah (digunakan bersama oleh BPSDM dan BKD);
3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 beserta Perkiraan Maju Tahun 2026 BPSDM terdapat dalam Tabel 3.3. Pada tahun 2023 terdapat 3 Program, 23 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan, serta 44 Aktivitas sub kegiatan pada 1 Sekretariat, 3 Bidang, dan 2 UPT (UPT PSPP termasuk UPT PPKKP yang berupa BLUD JPPC). Untuk penetapan Sub-kegiatan yang mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD) belum ditentukan karena belum ada pembahasan untuk hal ini.



Tabel 3.3
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A 5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
A 5 03							KEPEGAWAIAN								
A 5 03 02							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Percentase Pegawai Tugas Belajar yang lulus tepat waktu	Jakarta	80 persentase	20.538.127.885	PAD		80 persentase	20.538.127.885
A 5 03 02 1 03							Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Kepuasan atas fasilitas pelaksanaan tugas belajar	Jakarta	4 Nilai	20.538.127.885	PAD		4 Nilai	20.538.127.885
A 5 03 02 1 03 04							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jakarta	110 Orang	20.538.127.885	PAD		110 Orang	20.538.127.885
A 5 03 02 1 03 04							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jakarta	110 Orang	20.538.127.885	PAD		110 Orang	20.538.127.885
A 5 04							PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Jakarta			PAD			
A 5 04 02							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Jakarta	6 Nilai	20.336.662.258	PAD		6 Nilai	20.336.662.258
A 5 04 02 1 01							Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade	Jakarta	84 Persen	2.199.542.839	PAD		84 Persen	2.199.542.839



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A 5 04 02 1 01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jakarta	1 Dokumen	866.315.000	PAD		1 Dokumen	866.315.000						
A 5 04 02 1 01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jakarta	1 Dokumen	938.387.839	PAD		1 Dokumen	938.387.839						
A 5 04 02 1 01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknik sumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Jakarta	1 Dokumen	394.840.000	PAD		1 Dokumen	394.840.000						
A 5 04 02 1 02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	Jakarta	84 Persen	18.137.119.419	PAD		84 Persen	18.137.119.419						
A 5 04 02 1 02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Jakarta	1 Dokumen	33.050.000			1 Dokumen	33.050.000						
A 5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Jakarta	6 Nilai	20.336.662.258	PAD		6 Nilai	20.336.662.258						



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	5	04	02	1	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	Jakarta	84 Persen	18.137.119.419	PAD		84 Persen	18.137.119.419
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	16.836.802.530	PAD		1.331 Orang	16.836.802.530
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111
A	5	04	02	1	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111



KODE								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	5	04	02	1	02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111
A	5	04	02	1	02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jakarta	1.331 Orang	42.490.441.111	PAD		1.331 Orang	42.490.441.111
A	5	04	02					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Jakarta	6 Nilai	20.336.662.258	PAD		6 Nilai	20.336.662.258
A	5	04	02	1	02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	Jakarta	84 Persen	18.137.119.419	PAD		84 Persen	18.137.119.419
A	5	04	02	1	02	04		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jakarta	1 Laporan	113.750.000	PAD		1 Laporan	113.750.000
A	5	04	02	1	02	04		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jakarta	1 Laporan	113.750.000	PAD		1 Laporan	113.750.000
A	5	04	02	1	02	04		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jakarta	1 Laporan	113.750.000	PAD		1 Laporan	113.750.000
A	5	04	02					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Sistem Merit pada Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Jakarta	6 Nilai	20.336.662.258	PAD		6 Nilai	20.336.662.258
A	5	04	02	1	02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Percentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Lulus Passing Grade	Jakarta	84 Persen	18.137.119.419	PAD		84 Persen	18.137.119.419
A	5	04	02	1	02	03		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Jakarta	500 Orang	883.058.427	PAD		500 Orang	883.058.427



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	5	04	02	1	02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Jakarta	1 Dokumen	270.458.462	PAD		1 Dokumen	270.458.462
A	X						X								
A	X	XX					XX								
A	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4 Indeks	64.380.876.439	PAD		4 Indeks	64.380.876.439
A	X	XX	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Jakarta	4 Indeks	51.659.122.686	PAD		4 Indeks	51.659.122.686
A	X	XX	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	100 Orang/Bulan	51.659.122.686	PAD		100 Orang/Bulan	51.659.122.686
A	X	XX	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Jakarta	4 Indeks	120.023.699	PAD		4 Indeks	120.023.699
A	X	XX	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jakarta	4 Indeks	120.023.699	PAD		4 Indeks	120.023.699
A	X	XX	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	4 Indeks	5.744.866.664	PAD		4 Indeks	5.744.866.664
A	X	XX	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1 Paket	153.580.411	PAD		1 Paket	153.580.411
A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1 Paket	1.663.828.030	PAD		1 Paket	1.663.828.030
A	X	XX	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta	1 Laporan	40.632.525	PAD		1 Laporan	40.632.525



KODE								Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	X	XX	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta	1 Paket	36.474.357	PAD		1 Paket	36.474.357	
A	X	XX	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jakarta	1 Paket	165.641.420	PAD		1 Paket	165.641.420	
A	X	XX	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	12 Laporan	313.780.000	PAD		12 Laporan	313.780.000	
A	X	XX	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jakarta	4 Dokumen	3.370.929.921	PAD		4 Dokumen	3.370.929.921	
A	X	XX	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jakarta	4 Indeks	1.412.520.902	PAD		4 Indeks	1.412.520.902	
A	X	XX	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	100 Unit	1.412.520.902	PAD		100 Unit	1.412.520.902	
A	X	XX	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4 Indeks	5.072.939.579	PAD		4 Indeks	5.072.939.579	
A	X	XX	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta	12 Laporan	196.343.340	PAD		12 Laporan	196.343.340	
A	X	XX	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	12 Laporan	571.365.733	PAD		12 Laporan	571.365.733	
A	X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta	12 Laporan	4.305.230.506	PAD		12 Laporan	4.305.230.506	



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	X	XX	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	4 Indeks	371.402.909	PAD		4 Indeks	371.402.909
A	X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jakarta	10 Unit	222.678.109	PAD		10 Unit	222.678.109
A	X	XX	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	30 Unit	148.724.800	PAD		30 Unit	148.724.800
UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik															
A	5	04	02	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural		4 Nilai	8.957.279.834	PAD		4 Nilai	8.957.279.834
A	5	04	02	01			Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade	Jakarta	84 Persen	8.957.279.834	PAD		84 Persen	8.957.279.834
A	5	04	02	01	03		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jakarta	550 Orang	8.957.279.834	PAD		550 Orang	8.957.279.834
A	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PAD			
A	X	XX	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta	4 Indeks	398.243.941	PAD		4 Indeks	398.243.941
A	X	XX	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta	1 Laporan	199.990.758	PAD		1 Laporan	199.990.758



KODE							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jakarta	1 Paket	198.250.000	PAD		1 Paket	198.250.000
A	X	XX	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Jakarta	4 Indeks	196.293.277	PAD		4 Indeks	196.293.277
A	X	XX	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	10 Unit	196.293.277	PAD		10 Unit	196.293.277
A	X	XX	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Jakarta	4 Indeks	2.641.706.853	PAD		4 Indeks	2.641.706.853
A	X	XX	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jakarta	1 Unit Kerja	2.641.706.853	PAD		1 Unit Kerja	2.641.706.853



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPSDM TAHUN 2025

4



Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 terdiri dari program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran yang pada fase Renja ini masih menggunakan data pada Rancangan Perubahan Renstra BPSDM Tahun 2024 yang telah diinput pada Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah (SIPJM) Perubahan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renja tersebut tersaji dalam Tabel 4.1 di bawah ini.



Tabel 4. 1 Rencana Kerja PD/UKPD BPSDM Tahun 2025

Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
TERSAJI DALAM LAMPIRAN B RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD/UKPD BPSDM TAHUN 2025										



PENUTUP

5



PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2025. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023-2026 dengan mempedomani RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Fungsi Renja 2025 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 yang akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;
3. Pelaksanaan DPA Tahun 2025 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2026.

Selanjutnya, Dokumen Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025.

Jakarta,

2025

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibya

NIP 196507191985032002